Jurnal Dinamika Hukum
Vol. 11 No. 2 Januari 2011

Salam Redaksi

Hidup di Indonesia seperti hidup dalam sebuah ironi, paradoks tumbuh di mana-mana. Kondisi ini menyebabkan hampir tiap hari kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai masalah yang datang silih berganti. Ironi baru yang dimunculkan melalui media massa adalah berita tentang kebohongan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Boediono. Tokoh lintas agama yang sebenarnya berkompetensi dalam bidang olah kerohanian, turun gunung untuk mengingatkan pemerintah agar tak terjerumus dalam keasyikmasyukan kekuasaan yang menggiurkan. Pemerintah sepertinya harus belajar mendengar dari para guru rohani itu, bukan membantah ataupun menolaknya dengan argumen yang membingungkan rakyat.

Ada sembilan kebohongan lama yang dikemukakan, yaitu pemerintah telah berbohong dalam hal penyampaian angka kemiskinan, kebutuhan rakyat, ketahanan pangan dan energi, pemberantasan teroris, penegakan hak asasi manusia, anggaran pendidikan, kasus Lapindo, kasus Newmont, serta kasus Freeport. Ada pula sembilan kebohongan baru pemerintah yang berkenaan dengan kebebasan beragama; kebebasan pers; perlindungan terhadap TKI-pekerja migran; transparansi pemerintahan, pemberantasan korupsi; pengusutan rekening mencurigakan (gendut) perwira polisi; politik yang bersih, santun, beretika; kasus mafia hukum yang salah satunya adalah kasus Gayus H Tambunan; dan terkait kedaulatan NKRI.

Kebohongan terjadi jika apa yang diucapkan atau dikatakan itu ternyata tidak benar, hal ini berbeda benar dengan "belum terwujud". Oleh karena itu, apakah sembilan kebohongan yang lama maupun yang baru itu lebih tepat dikatakan sebagai "kebohongan" atau "belum terwujud"?. Permasalahannya adalah perlu jangka waktu berapa lama agar apa yang diucapkan atau dikatakan atau diprogramkan itu menjadi kenyataan, dan dengan apa cara mengukurnya?. Jikalah dalam waktu yang wajar dan dapat diterima akal sehat waktu yang dibutuhkan untuk itu telah selesai tenggatnya, maka dapatlah dikatakan kebohongan. Persamalahan lain yang muncul adalah, apakah untuk menyelesaikan permasalahan itu perlu diberi tenggat. Sebagai sebuah negara yang tentunya memiliki program kerja, maka tenggat waktu pencapaian tujuan menjadi penting sebagai indikator pengukuran kinerja, oleh karena itu jika tenggat telah selesai dan tujuan tak tercapai, dapatlah dikatakan ada kebohongan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Akan tetapi beranikah pemerintah mengakuinya? Perlu jiwa besar untuk menjawabnya.

Pada akhirnya yang ingin diungkapkan adalah bahwa kejujuran dalam pekerjaan maupun sisi kehidupan yang lain amat penting. Kejujuran dan sikap kesatria untuk menerima perbedaan pendapat akan membawa bangsa ini pada kesehatan jasmani dan rohani, meski bencana datang silih berganti. Adakah komitmen pemerintah beserta aparatnya untuk jujur, sesuatu yang perlu diusahakan dan diwujudkan secara terus menerus, agar apa yang disebut *good governance* dapat tercapai. Semoga kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tumbuh subur di Indonesia, karena tanah air kita (Indonesia) adalah "tanah surga".

Purwokerto, Januari 2011

Ketua Penyunting

Agus Raharjo